



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2015

BKN. Instansi Pusat dan Daerah. Angka
Kode. Kantor Regional. Kode Pengenal.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penambahan Instansi Pemerintah/pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota serta adanya penambahan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara perlu mengubah angka kode instansi pusat dan daerah serta menambah kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa ketentuan mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 belum

mengatur penambahan dan/atau perubahan instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional tersebut;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Regional XIII dan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1058);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Untuk tertib administrasi pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian, masing-masing instansi pusat dan daerah diberikan angka kode instansi yang terdiri dari 5 (lima) digit angka.
- (2) Untuk tertib administrasi penetapan mutasi kepegawaian, pada setiap Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diberikan kode pengenal.

Pasal 2

- (1) Angka Kode Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA
 KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE PENGENAL

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

NO	NAMA INSTANSI	
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)	1
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1
4	Kementerian Koordinator Bidang Maritim	1
5	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1
6	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1
8	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1
10	Kementerian Pemuda Olahraga	1
11	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1
12	Kementerian Dalam Negeri	1
13	Kementerian Luar Negeri	1
14	Kementerian Pertahanan	1
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1
16	Kementerian Keuangan	1
17	Kementerian Pertanian	1
18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
19	Kementerian Perhubungan	1
20	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	1
21	Kementerian Kesehatan	1
22	Kementerian Agama	1
23	Kementerian Tenaga Kerja	1
24	Kementerian Sosial	1
25	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
26	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	1

27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
28	Kementerian Perdagangan	1
29	Kementerian Perindustrian	1
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
31	Kementerian Pariwisata	1
32	Kementerian Sekretariat Negara	1
33	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
35	Mahkamah Agung Republik Indonesia	1
36	Kejaksaan Agung	1
37	Kepolisian Negara	1
38	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	1
39	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1
40	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1
41	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1
42	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1
43	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	1
44	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1
45	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	1
46	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
47	Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1
48	Sekretariat Kabinet	1
49	Sekretariat Presiden	1
50	Sekretariat Wakil Presiden	1
51	Badan Kepegawaian Negara	1
52	Badan Informasi Geospasial	1
53	Badan Intelijen Negara	1
54	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	1
55	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
56	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
57	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1
58	Badan Narkotika Nasional	1
59	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
60	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1
61	Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1
62	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1
63	Badan Pemeriksa Keuangan	1
64	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1

65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1
66	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1
67	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
68	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
69	Badan Pusat Statistik	1
70	Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas)	1
71	Badan Standardisasi Nasional	1
72	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
73	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
74	Lembaga Administrasi Negara	1
75	Lembaga Sandi Negara	1
76	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1
77	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1
78	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	1
79	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1
80	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1
81	Ombudsman Republik Indonesia	1
82	Arsip Nasional Republik Indonesia	1
83	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1
84	Pemerintah Aceh	2
85	Pemerintah Kabupaten Simeulue	2
86	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	2
87	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	2
88	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	2
89	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	2
90	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	2
91	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	2
92	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	2
93	Pemerintah Kabupaten Pidie	2
94	Pemerintah Kabupaten Bireuen	2
95	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2
96	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	2
97	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	2
98	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	2
99	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	2
100	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	2
101	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	2
102	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	2

103	Pemerintah Kota Banda Aceh	2
104	Pemerintah Kota Sabang	2
105	Pemerintah Kota Langsa	2
106	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2
107	Pemerintah Kota Subulussalam	2
108	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2
109	Pemerintah Kabupaten Nias	2
110	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	2
111	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	2
112	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	2
113	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2
114	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2
115	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	2
116	Pemerintah Kabupaten Asahan	2
117	Pemerintah Kabupaten Simalungun	2
118	Pemerintah Kabupaten Dairi	2
119	Pemerintah Kabupaten Karo	2
120	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2
121	Pemerintah Kabupaten Langkat	2
122	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2
123	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	2
124	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	2
125	Pemerintah Kabupaten Samosir	2
126	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2
127	Pemerintah Kabupaten Batubara	2
128	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	2
129	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	2
130	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2
131	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	2
132	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	2
133	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	2
134	Pemerintah Kota Sibolga	2
135	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2
136	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2
137	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2
138	Pemerintah Kota Medan	2
139	Pemerintah Kota Binjai	2
140	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2

141	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2
142	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2
143	Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai	2
144	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2
145	Pemerintah Kabupaten Solok	2
146	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	2
147	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	2
148	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	2
149	Pemerintah Kabupaten Agam	2
150	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	2
151	Pemerintah Kabupaten Pasaman	2
152	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	2
153	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2
154	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	2
155	Pemerintah Kota Padang	2
156	Pemerintah Kota Solok	2
157	Pemerintah Kota Sawahlunto	2
158	Pemerintah Kota Padang Panjang	2
159	Pemerintah Kota Bukittinggi	2
160	Pemerintah Kota Payakumbuh	2
161	Pemerintah Kota Pariaman	2
162	Pemerintah Provinsi Riau	2
163	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	2
164	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	2
165	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	2
166	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2
167	Pemerintah Kabupaten Siak	2
168	Pemerintah Kabupaten Kampar	2
169	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	2
170	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2
171	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	2
172	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	2
173	Pemerintah Kota Pekanbaru	2
174	Pemerintah Kota Dumai	2
175	Pemerintah Provinsi Jambi	2
176	Pemerintah Kabupaten Kerinci	2
177	Pemerintah Kabupaten Merangin	2
178	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	2

179	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	2
180	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	2
181	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2
182	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2
183	Pemerintah Kabupaten Tebo	2
184	Pemerintah Kabupaten Bungo	2
185	Pemerintah Kota Jambi	2
186	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2
187	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2
188	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	2
189	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	2
190	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2
191	Pemerintah Kabupaten Lahat	2
192	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	2
193	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	2
194	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	2
195	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.	2
196	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2
197	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	2
198	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	2
199	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	2
200	Pemerintah Kota Palembang	2
201	Pemerintah Kota Prabumulih	2
202	Pemerintah Kota Pagar Alam	2
203	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2
204	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2
205	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2
206	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	2
207	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	2
208	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	2
209	Pemerintah Kabupaten Kaur	2
210	Pemerintah Kabupaten Seluma	2
211	Pemerintah Kabupaten Mukomuko	2
212	Pemerintah Kabupaten Lebong	2
213	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	2
214	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	2
215	Pemerintah Kota Bengkulu	2
216	Pemerintah Provinsi Lampung	2

217	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	2
218	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	2
219	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	2
220	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	2
221	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	2
222	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	2
223	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	2
224	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	2
225	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	2
226	Pemerintah Kabupaten Mesuji	2
227	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2
228	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	2
229	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	2
230	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2
231	Pemerintah Kota Metro	2
232	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	2
233	Pemerintah Kabupaten Bangka	2
234	Pemerintah Kabupaten Belitung	2
235	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	2
236	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	2
237	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	2
238	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	2
239	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2
240	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2
241	Pemerintah Kabupaten Karimun	2
242	Pemerintah Kabupaten Bintan	2
243	Pemerintah Kabupaten Natuna	2
244	Pemerintah Kabupaten Lingga	2
245	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	2
246	Pemerintah Kota Batam	2
247	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2
248	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2
249	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2
250	Pemerintah Kabupaten Bogor	2
251	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2
252	Pemerintah Kabupaten Cianjur	2
253	Pemerintah Kabupaten Bandung	2
254	Pemerintah Kabupaten Garut	2

255	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	2
256	Pemerintah Kabupaten Ciamis	2
257	Pemerintah Kabupaten Kuningan	2
258	Pemerintah Kabupaten Cirebon	2
259	Pemerintah Kabupaten Majalengka	2
260	Pemerintah Kabupaten Sumedang	2
261	Pemerintah Kabupaten Indramayu	2
262	Pemerintah Kabupaten Subang	2
263	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	2
264	Pemerintah Kabupaten Karawang	2
265	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2
266	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	2
267	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	2
268	Pemerintah Kota Bogor	2
269	Pemerintah Kota Sukabumi	2
270	Pemerintah Kota Bandung	2
271	Pemerintah Kota Cirebon	2
272	Pemerintah Kota Bekasi	2
273	Pemerintah Kota Depok	2
274	Pemerintah Kota Cimahi	2
275	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2
276	Pemerintah Kota Banjar	2
277	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2
278	Pemerintah Kabupaten Cilacap	2
279	Pemerintah Kabupaten Banyumas	2
280	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	2
281	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	2
282	Pemerintah Kabupaten Kebumen	2
283	Pemerintah Kabupaten Purworejo	2
284	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	2
285	Pemerintah Kabupaten Magelang	2
286	Pemerintah Kabupaten Boyolali	2
287	Pemerintah Kabupaten Klaten	2
288	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	2
289	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	2
290	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	2
291	Pemerintah Kabupaten Sragen	2
292	Pemerintah Kabupaten Grobogan	2

293	Pemerintah Kabupaten Blora	2
294	Pemerintah Kabupaten Rembang	2
295	Pemerintah Kabupaten Pati	2
296	Pemerintah Kabupaten Kudus	2
297	Pemerintah Kabupaten Jepara	2
298	Pemerintah Kabupaten Demak	2
299	Pemerintah Kabupaten Semarang	2
300	Pemerintah Kabupaten Temanggung	2
301	Pemerintah Kabupaten Kendal	2
302	Pemerintah Kabupaten Batang	2
303	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	2
304	Pemerintah Kabupaten Pemalang	2
305	Pemerintah Kabupaten Tegal	2
306	Pemerintah Kabupaten Brebes	2
307	Pemerintah Kota Magelang	2
308	Pemerintah Kota Surakarta	2
309	Pemerintah Kota Salatiga	2
310	Pemerintah Kota Semarang	2
311	Pemerintah Kota Pekalongan	2
312	Pemerintah Kota Tegal	2
313	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2
314	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	2
315	Pemerintah Kabupaten Bantul	2
316	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	2
317	Pemerintah Kabupaten Sleman	2
318	Pemerintah Kota Yogyakarta	2
319	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2
320	Pemerintah Kabupaten Pacitan	2
321	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2
322	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	2
323	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	2
324	Pemerintah Kabupaten Blitar	2
325	Pemerintah Kabupaten Kediri	2
326	Pemerintah Kabupaten Malang	2
327	Pemerintah Kabupaten Lumajang	2
328	Pemerintah Kabupaten Jember	2
329	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2
330	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	2

331	Pemerintah Kabupaten Situbondo	2
332	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	2
333	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	2
334	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2
335	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	2
336	Pemerintah Kabupaten Jombang	2
337	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	2
338	Pemerintah Kabupaten Madiun	2
339	Pemerintah Kabupaten Magetan	2
340	Pemerintah Kabupaten Ngawi	2
341	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2
342	Pemerintah Kabupaten Tuban	2
343	Pemerintah Kabupaten Lamongan	2
344	Pemerintah Kabupaten Gresik	2
345	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	2
346	Pemerintah Kabupaten Sampang	2
347	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	2
348	Pemerintah Kabupaten Sumenep	2
349	Pemerintah Kota Kediri	2
350	Pemerintah Kota Blitar	2
351	Pemerintah Kota Malang	2
352	Pemerintah Kota Probolinggo	2
353	Pemerintah Kota Pasuruan	2
354	Pemerintah Kota Mojokerto	2
355	Pemerintah Kota Madiun	2
356	Pemerintah Kota Surabaya	2
357	Pemerintah Kota Batu	2
358	Pemerintah Provinsi Banten	2
359	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	2
360	Pemerintah Kabupaten Lebak	2
361	Pemerintah Kabupaten Tangerang	2
362	Pemerintah Kabupaten Serang	2
363	Pemerintah Kota Tangerang	2
364	Pemerintah Kota Cilegon	2
365	Pemerintah Kota Serang	2
366	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2
367	Pemerintah Provinsi Bali	2
368	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2

369	Pemerintah Kabupaten Tabanan	2
370	Pemerintah Kabupaten Badung	2
371	Pemerintah Kabupaten Gianyar	2
372	Pemerintah Kabupaten Klungkung	2
373	Pemerintah Kabupaten Bangli	2
374	Pemerintah Kabupaten Karangasem	2
375	Pemerintah Kabupaten Buleleng	2
376	Pemerintah Kota Denpasar	2
377	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
378	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2
379	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	2
380	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	2
381	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	2
382	Pemerintah Kabupaten Dompu	2
383	Pemerintah Kabupaten Bima	2
384	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	2
385	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	2
386	Pemerintah Kota Mataram	2
387	Pemerintah Kota Bima	2
388	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
389	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	2
390	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2
391	Pemerintah Kabupaten Kupang	2
392	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	2
393	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2
394	Pemerintah Kabupaten Belu	2
395	Pemerintah Kabupaten Alor	2
396	Pemerintah Kabupaten Lembata	2
397	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2
398	Pemerintah Kabupaten Sikka	2
399	Pemerintah Kabupaten Ende	2
400	Pemerintah Kabupaten Ngada	2
401	Pemerintah Kabupaten Manggarai	2
402	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	2
403	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	2
404	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2
405	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	2
406	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	2

407	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	2
408	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	2
409	Pemerintah Kabupaten Malaka	2
410	Pemerintah Kota Kupang	2
411	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2
412	Pemerintah Kabupaten Sambas	2
413	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	2
414	Pemerintah Kabupaten Landak	2
415	Pemerintah Kabupaten Pontianak	2
416	Pemerintah Kabupaten Sanggau	2
417	Pemerintah Kabupaten Ketapang	2
418	Pemerintah Kabupaten Sintang	2
419	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	2
420	Pemerintah Kabupaten Sekadau	2
421	Pemerintah Kabupaten Melawi	2
422	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	2
423	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	2
424	Pemerintah Kota Pontianak	2
425	Pemerintah Kota Singkawang	2
426	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2
427	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2
428	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	2
429	Pemerintah Kabupaten Kapuas	2
430	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	2
431	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	2
432	Pemerintah Kabupaten Sukamara	2
433	Pemerintah Kabupaten Lamandau	2
434	Pemerintah Kabupaten Seruyan	2
435	Pemerintah Kabupaten Katingan	2
436	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	2
437	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	2
438	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	2
439	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	2
440	Pemerintah Kota Palangka Raya	2
441	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2
442	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2
443	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	2
444	Pemerintah Kabupaten Banjar	2

445	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2
446	Pemerintah Kabupaten Tapin	2
447	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2
448	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2
449	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	2
450	Pemerintah Kabupaten Tabalong	2
451	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	2
452	Pemerintah Kabupaten Balangan	2
453	Pemerintah Kota Banjarmasin	2
454	Pemerintah Kota Banjarbaru	2
455	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2
456	Pemerintah Kabupaten Paser	2
457	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	2
458	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2
459	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	2
460	Pemerintah Kabupaten Berau	2
461	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	2
462	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2
463	Pemerintah Kota Balikpapan	2
464	Pemerintah Kota Samarinda	2
465	Pemerintah Kota Bontang	2
466	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2
467	Pemerintah Kabupaten Bulungan	2
468	Pemerintah Kabupaten Malinau	2
469	Pemerintah Kabupaten Nunukan	2
470	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	2
471	Pemerintah Kota Tarakan	2
472	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2
473	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	2
474	Pemerintah Kabupaten Minahasa	2
475	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	2
476	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	2
477	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	2
478	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	2
479	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2
480	Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	2
481	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	2
482	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2

483	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2
484	Pemerintah Kota Manado	2
485	Pemerintah Kota Bitung	2
486	Pemerintah Kota Tomohon	2
487	Pemerintah Kota KotaMobagu	2
488	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2
489	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2
490	Pemerintah Kabupaten Banggai	2
491	Pemerintah Kabupaten Morowali	2
492	Pemerintah Kabupaten Poso	2
493	Pemerintah Kabupaten Donggala	2
494	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	2
495	Pemerintah Kabupaten Buol	2
496	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2
497	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	2
498	Pemerintah Kabupaten Sigi	2
499	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	2
500	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	2
501	Pemerintah Kota Palu	2
502	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2
503	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	2
504	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	2
505	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2
506	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	2
507	Pemerintah Kabupaten Takalar	2
508	Pemerintah Kabupaten Gowa	2
509	Pemerintah Kabupaten Sinjai	2
510	Pemerintah Kabupaten Maros	2
511	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2
512	Pemerintah Kabupaten Barru	2
513	Pemerintah Kabupaten Bone	2
514	Pemerintah Kabupaten Soppeng	2
515	Pemerintah Kabupaten Wajo	2
516	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	2
517	Pemerintah Kabupaten Pinrang	2
518	Pemerintah Kabupaten Enrekang	2
519	Pemerintah Kabupaten Luwu	2
520	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	2

521	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2
522	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	2
523	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2
524	Pemerintah Kota Makassar	2
525	Pemerintah Kota Parepare	2
526	Pemerintah Kota Palopo	2
527	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2
528	Pemerintah Kabupaten Buton	2
529	Pemerintah Kabupaten Muna	2
530	Pemerintah Kabupaten Konawe	2
531	Pemerintah Kabupaten Kolaka	2
532	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	2
533	Pemerintah Kabupaten Bombana	2
534	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	2
535	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	2
536	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	2
537	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	2
538	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	2
539	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	2
540	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	2
541	Pemerintah Kota Kendari	2
542	Pemerintah Kota Baubau	2
543	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2
544	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2
545	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2
546	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	2
547	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	2
548	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	2
549	Pemerintah Kota Gorontalo	2
550	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2
551	Pemerintah Kabupaten Majene	2
552	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	2
553	Pemerintah Kabupaten Mamasa	2
554	Pemerintah Kabupaten Mamuju	2
555	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	2
556	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	2
557	Pemerintah Provinsi Maluku	2
558	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2

559	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	2
560	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	2
561	Pemerintah Kabupaten Buru	2
562	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	2
563	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	2
564	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	2
565	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	2
566	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	2
567	Pemerintah Kota Ambon	2
568	Pemerintah Kota Tual	2
569	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2
570	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	2
571	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2
572	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	2
573	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	2
574	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	2
575	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	2
576	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	2
577	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	2
578	Pemerintah Kota Ternate	2
579	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2
580	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2
581	Pemerintah Kabupaten Fak-Fak	2
582	Pemerintah Kabupaten Kaimana	2
583	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	2
584	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	2
585	Pemerintah Kabupaten Manokwari	2
586	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	2
587	Pemerintah Kabupaten Sorong	2
588	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	2
589	Pemerintah Kabupaten Maybrat	2
590	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	2
591	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	2
592	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	2
593	Pemerintah Kota Sorong	2
594	Pemerintah Provinsi Papua	2
595	Pemerintah Kabupaten Merauke	2
596	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	2

597	Pemerintah Kabupaten Jayapura	2
598	Pemerintah Kabupaten Nabire	2
599	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	2
600	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	2
601	Pemerintah Kabupaten Paniai	2
602	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	2
603	Pemerintah Kabupaten Mimika	2
604	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	2
605	Pemerintah Kabupaten Mappi	2
606	Pemerintah Kabupaten Asmat	2
607	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	2
608	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	2
609	Pemerintah Kabupaten Tolikara	2
610	Pemerintah Kabupaten Sarmi	2
611	Pemerintah Kabupaten Keerom	2
612	Pemerintah Kabupaten Waropen	2
613	Pemerintah Kabupaten Supiori	2
614	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	2
615	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	2
616	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	2
617	Pemerintah Kabupaten Yalimo	2
618	Pemerintah Kabupaten Nduga	2
619	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	2
620	Pemerintah Kabupaten Deiyai	2
621	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	2
622	Pemerintah Kabupaten Puncak	2
623	Pemerintah Kota Jayapura	2

EPALA

KEPEGAWAIAN NEGARA,

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
 SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DAFTAR KODE PENGENAL
 KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	KODE PENGENAL
1	2	3
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	B
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	C
3	Kantor Regional III BKN Bandung	D
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	E
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	F
6	Kantor Regional VI BKN Medan	G
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	H
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	I
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	J
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	K
11	Kantor Regional XI BKN Manado	L
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	M
13	Kantor Regional XIII BKN Aceh	N
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	O

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO